

SARASEHAN NASIONAL ANTROPOLOGI 2010¹

**“Re-invensi Antropologi Indonesia di Era
Demokrasi dan Globalisasi”**

Cisarua, 21-23 Juli 2010

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES VII/2010

**“Keanekaragaman Makanan Indonesia dan Ketahanan
Pangan Nasional”**

21 Juli 2010

KETAHANAN PANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji



¹ Copyright of Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2010. This publication is a copyright and remains the intellectual property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and its writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN**

**KETAHANAN PANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP
SISTIM PERTAHANAN NEGARA**

Oleh : * Budi Susilo Soepandji

I. PENDAHULUAN.

Sebagaimana yang ditegaskan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuklah suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ". Secara filosofis pemerintah negara mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin, sejalan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" pernyataan menjelaskan secara konstitusional, pemerintah negara diberi kewenangan memanfaatkan semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sejarah bangsa Indonesia sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas dan luput dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Namun hingga saat ini bangsa Indonesia tetap survive ditengah-tengah persaingan dunia khususnya dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Hal tersebut adalah karena bangsa Indonesia memiliki **Ketahanan Nasional**, yang unsurnya adalah ketahanan dalam bidang : **ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan**. Ketahanan nasional yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional serta mewadahi seluruh kehidupan nasional secara terintegrasi, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang langsung maupun tidak langsung, baik yang membahayakan kehidupan nasional guna menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai Tujuan Nasionalnya. Namun karena ketahanan nasional bersifat dinamis, sehingga perlu upaya terus menerus agar ketahanan nasional bangsa Indonesia tetap kuat dan tangguh, agar dapat mengatasi setiap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang muncul.

Masalah **ketahanan pangan** merupakan salah satu sub dari unsur ketahanan nasional, yang dapat dikaitkan dengan **ketahanan ekonomi** maupun **ketahanan sosial budaya**, bahkan dapat masuk dalam **ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan** bila kita melihat bahwa kualitas dan kuantitas pangan akan berpengaruh

** Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Ceramah yang disampaikan pada acara diskusi panel "Koentjaraningrat Memorial Lectures VII" tema Keanekaragaman Makanan Indonesia dan Ketahanan Pangan Nasional" Cisarua, 21-23 Juli 2010.*

juga terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakan salah satu sumber daya nasional utama bagi sistem pertahanan negara. Oleh karena itu pembahasan masalah ketahanan pangan sangat tepat ditengah semakin besarnya kebutuhan pangan dunia saat ini, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta semakin sengitnya kompetisi dunia.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan pelajaran berharga yang menunjukkan pentingnya logistik dalam mendukung pertahanan negara. Pada Abad ke-17 dukungan logistik untuk berperang sudah tertanam dalam sejarah perjuangan Kerajaan Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai raja, ingin mempersatukan Nusantara dibawah kekuasaan bangsa sendiri, melawan politik *Devide Et Impera* dari penjajah Belanda. Namun upaya Sultan Agung gagal karena Belanda mengetahui rencananya dan memerintahkan kaki tangan Belanda untuk membakar lumbung padi disepanjang rute ke Batavia. Namun disisi lain perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda (Jenderal De Cock) di daerah Delangu dapat bertahan, meskipun Belanda menjalankan Sistem *Benteng Stelsel*. Hal tersebut dikarenakan Pangeran Diponegoro membekali rakyatnya dengan nasi aking, sehingga mampu bertahan untuk terus mengadakan perlawanan yang relatif lama lebih kurang selama lima tahun .

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, maka masalah ketahanan pangan merupakan masalah nasional. Hal tersebut merupakan akibat dari sistem pertanian yang dilakukan secara tradisional (sehingga produksi pangan tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat). Menurut Maslow, maka kebutuhan pangan berada pada urutan pertama dari piramida kebutuhan manusia (walaupun banyak yang menentang teori tersebut, karena kebutuhan manusia tidak pernah bisa diurut sesuai urutan piramida tersebut).

Bahkan seorang pendeta di Inggris pada awal abad ke XVIII sudah memperhatikan akan hubungan kebutuhan pangan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan teori Malthus. Walaupun teori ini juga sempat menjadi jungkir balik ketika ditemukan revolusi hijau yang mampu meningkatkan produksi pangan dunia dan timbulnya kesadaran untuk pengendalian penduduk dengan program keluarga berencana khususnya di Eropa. Isu ketahanan pangan juga terkait dengan "*human security*", sehingga dalam pertemuan pangan dunia tahun 1969 isu pangan sudah menjadi agenda dunia. Bagi bangsa Indonesia sendiri, ketahanan pangan telah dicantumkan dalam Undang-undang no 7 tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai : **Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari jumlah tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, murah, dan terjangkau.**

Mengingat bahwa masalah pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisiologis, maka kebutuhan tersebut harus tersedia secara rutin/setiap hari, sehingga ketika kebutuhan tersebut diperlukan, harus tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat. Sementara itu sesuai sifatnya, tanaman pangan harus disiapkan melalui proses yang panjang, dan tidak dapat bersifat instan, karena tanaman pangan juga memerlukan perawatan secara intensif mulai dari pembibitan, pemupukan, pengairan, perawatan, dan lain sebagainya. Sementara itu tingkat kehidupan sosial

masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sehingga produktifitasnya pun rendah. Bahkan masalah pangan pemerintah Belanda juga sudah mewaspadai akan perlunya jaminan suplai pangan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas sosial masyarakat.

Masalah pangan adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang harus disiapkan Pemerintah, karena merupakan dari hak hidup manusia, sehingga menyangkut hak azasi manusia. Oleh karena itu menurut saya tema seminar para antropolog tentang ketahanan pangan ini sangat tepat, sebagai kepedulian kepada bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, sehingga ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi dapat memicu *instink* manusia yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk survive, atau secara ekstrimnya akan munculnya sifat hewani untuk survive. Apabila hal ini terjadi, maka manusia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan segala cara, dan menghalalkan segala cara, seperti halnya sejarah masa lalu dimana banyak penyebab perang adalah perebutan sumber logistik/pangan. Apabila kondisi tersebut terjadi, tentunya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat, khususnya tentang ketertiban masyarakat, yang pada eskalasi tertentu akan berpengaruh terhadap keamanan suatu negara, atau sistim pertahanan suatu negara.

Oleh karena itu judul makalah yang saya sampaikan adalah: "Ketahanan Pangan dan dampaknya terhadap sistim pertahanan Negara". Dengan demikian maka kebutuhan pangan harus disiapkan secara terpadu dan tidak dapat ditunda-tunda sebagai bagian dari ketahanan nasional..

II. SISTIM PERTAHANAN SEMESTA

Sesuai dengan amanat konstitusi pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan: **Usaha Pertahanan Negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**

Bagi bangsa Indonesia perang yang diselenggarakan adalah untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah, serta melindungi keselamatan segenap bangsa, sehingga dilaksanakan secara total. Dalam melaksanakan perang bangsa Indonesia akan berpegang kepada : keyakinan akan kekuatan sendiri, tidak mengenal lelah, dan tidak akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada pihak musuh, keyakinan akan kemenangan dan perlawanan tidak berhenti sebelum mencapai kemenangan. Perang akan dilaksanakan dengan strategi berlapis dan mendalam dengan mendaya gunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional kedalam konsep perang semesta. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan perang semesta perlu dilaksanakan penataan sistem pertahanan yang meliputi : penyiapan kekuatan, penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan, penyiapan logistik pertahanan, pelaksanaan peperangan, dan pemulihan terhadap dampak kerusakan akibat peperangan.

Sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (2) Undang-undang no 3 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa : **Sistim pertahanan Negara adalah sistim pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warganegara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.** Sehingga jelas bahwa bangsa Indonesia telah memilih sistim pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang melibatkan seluruh rakyat dan warganegara dan sumber daya alam (termasuk pangan) akan dilibatkan dalam sistim pertahanan tersebut. Sumber daya manusia (rakyat Indonesia) adalah unsur utama dalam sistim pertahanan tersebut, namun tentunya adalah sumber daya manusia/ rakyat yang **sehat, kuat, terlatih** dan **memiliki semangat bela negara**. Sedangkan sumber daya nasional lainnya, khususnya sumber daya alam yang diantaranya merupakan bahan pangan harus disiapkan secara dini untuk dapat ditransformasikan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah dengan cara : diinventarisasi, dianalisa, dikoordinasikan, diatur dengan regulasi, serta diawasi agar dapat potensi itu dapat menjadi kekuatan bila sewaktu-waktu diperlukan.

III. KONDISI PANGAN DUNIA SAAT INI

Pangan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisiologis, yang harus selalu ada, masalah ketahanan pangan sesungguhnya bukan hanya problem bangsa Indonesia, karena kekurangan pangan juga dialami oleh negara-negara lain didunia khususnya dibenua Afrika, dan Asia. Sementara itu negara-negara di Amerika Utara, Eropa dan Australia relatif kebutuhan pangannya tercukupi bahkan melebihi kebutuhan yang seharusnya. Dalam 10 tahun terakhir, dimana dunia telah mengkonsumsi pangan lebih banyak dari pada pangan yang dihasilkan, mengakibatkan pada periode tahun 2005 hingga 2008 harga gandum dan jagung dipasar dunia telah naik 3 x lipat, sedangkan harga beras telah naik 5 x lipat. Namun yang sangat menarik bahwa kenaikan tersebut bukan akibat merosotnya angka produksi, namun hal tersebut sebagai indikasi akibat melonjaknya kebutuhan akan pangan dunia, dan hal tersebut menunjukkan bahwa dunia sebenarnya sedang kekurangan pangan. Bahkan Paul Ehrlich pernah memperingatkan bahwa dunia pada tahun 1970 - 1980an akan mengalami kelaparan akibat pertumbuhan populasi penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Untuk saat ini Bank Dunia memprediksikan bahwa pada tahun 2040 akan terjadi defisit produksi pangan dunia, karena prediksi pertumbuhan populasi penduduk dunia yang diperkirakan akan menjadi **8 miliar pada tahun 2025**, dan akan **menjadi 9 miliar pada tahun 2050**.

Hubungan antara populasi manusia dengan produksi pangan telah dibahas oleh Malthus pada tahun 1798, dimana disebutkan bahwa **pertumbuhan penduduk meningkat menurut deret ukur** dan akan menjadi berlipat dua setiap 25 tahun bila tidak dikendalikan, sementara itu **produk pertanian meningkat sesuai dengan deret hitung**.

Meskipun demikian teori Malthus tersebut dianggap sangat pesimistis, bahkan menjadi cemoohan ketika revolusi industri dan green revolution telah berhasil meningkatkan produksi pangan (kita tidak membahas teori Malthus).

Permasalahan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia adalah konflik kepentingan antara kebutuhan pangan dengan lingkungan. Akibat permintaan produksi pangan, banyak negara yang harus memperluas lahan pertanian, akibatnya banyak hutan-hutan tadah hujan dan hutan tropis yang harus dibabat untuk diubah menjadi lahan pertanian. Sebagai contoh Brasilia untuk memperluas lahan kedelainya sejak tahun 1990 hingga 2005 telah memperluas lahannya sebesar 10%/tahun. Sementara itu akibat pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim yang sulit diprediksi, yang akan berpengaruh terhadap sistim pengairan karena pada umumnya masih di pengaruhi oleh jumlah curah hujan setempat.

Meskipun *revolusi hijau* pada tahun 1950an hingga 1990an telah berhasil meningkatkan angka produksi pangan, beberapa pakar menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin besar, maka perlu dilaksanakan revolusi hijau jilid II (yang ramah lingkungan), karena revolusi hijau I telah menggunakan air tanah, pupuk buatan dan pestisida secara berlebihan sehingga dikawatirkan justru akan merusak kelestarian lingkungan. Karena akibat irigasi tersebut di Punjab India telah disodot lebih dari 1,3 juta sumur yang menyebabkan penurunan permukaan air tanah. Sedangkan penggunaan pestisida dan pupuk buatan telah merusak kesuburan tanah. Demikian juga kebutuhan pupuk, khususnya nitrogen adalah terkait dengan suplai gas alam yang tentunya hanya dapat terdukung bila harga bahan bakar fosil masih terjangkau. Oleh karena itu revolusi hijau jilid II harus direncanakan dengan belajar dari pengalaman sejarah umat manusia pada masa lalu (revolusi hijau I). Beberapa terobosan yang mungkin dilaksanakan untuk menyusun revolusi hijau yang ramah lingkungan antara lain dengan rekayasa genetik untuk mencari bibit tanaman pangan yang : tahan terhadap kekeringan, yang dapat hidup dengan kondisi tanah yang sudah miskin hara, namun mempunyai produksi yang cukup tinggi. Oleh karena itu perlu kita pikirkan bersama apakah revolusi hijau II kita perlukan?

*** Ketahanan Pangan di Indonesia.**

Bagi bangsa Indonesia sesungguhnya masalah ketahanan pangan bukan merupakan ancaman yang crucial, mengingat negara Indonesia berada di daerah tropis, dan memiliki keaneka ragaman hayati yang berpotensi sebagai sumber daya pangan seperti : beras, jagung, gandum, sagu, ubi kayu, ubi jalar, ganyong, talas, dll. Potensi keanekaragaman pangan juga didukung dengan iklim tropis Indonesia sehingga dapat menghasilkan pangan sepanjang tahun. Permasalahannya adalah karena bangsa Indonesia saat ini menjadi negara konsumsi beras terbesar di Asean dengan jumlah 132kg/ kapita/ tahun. Disamping itu, akibat keberhasilan produksi pangan pada masa orde baru, maka beras menjadi komoditas pangan nasional, dan mengesampingkan kearifan lokal dalam bidang pangan. Sehingga masyarakat yang secara tradisional awalnya tidak makan beras, telah merubah pola makannya menjadi

konsumen beras. Sehingga ketika mereka menjadi tergantung kepada beras, maka demand akan beras menjadi meningkat. Masalah penyediaan pangan di Indonesia merupakan sejarah panjang yang sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda.

Pada masa penjajahan. Masalah ketahanan pangan di Indonesia sudah diawali sejak jaman penjajahan Belanda, pada saat itu Pemerintah Belanda sudah membentuk lembaga pangan yang mengurus distribusi dan logistik beras yaitu *stichting het voedingsmidlenfonds* pada tahun 1939. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah pangan/ beras sangat penting dan perlu perhatian khusus pemerintah. Kebijakan umum saat itu adalah masyarakat diberikan kebebasan pasar dengan sedikit pengendalian pemerintah. Pada awal 1933 impor beras dibatasi dengan cara harga beras diawasi langsung oleh pemerintah. Pemerintah juga menggalakkan perdagangan beras antar pulau sehingga daerah yang surplus beras (di Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan) dapat mensuplai ke daerah diluar Jawa yang defisit. Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, maka lembaga ini diambil alih oleh penguasa Jepang, dan diberi nama *Sangyobun Nanyo Kohatsu Kaisha* (SKK). Pada masa itu campur tangan penguasa sangat besar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bala tentara Jepang dalam perang.

Pada masa Orde Lama. Pada sekitar tahun 1957, harga beras meningkat tajam. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menempuh distribusi beras secara fisik terutama untuk menjamin kebutuhan militer dan pegawai negeri, dan terus menstabilkan harga ditingkat eceran dan mengajak golongan pribumi untuk turut berpartisipasi dengan cara membayarkan sebagian dari gaji mereka dalam bentuk beras. Keadaan tersebut semakin meluas kepada rakyat banyak, sehingga pemerintah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga Pemerintah membentuk **Yayasan Badan Pembelian kebutuhan Padi** (YBPP) yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan beras kepada konsumen. Pemerintah melaksanakan program swasembada beras. Hal tersebut dilatar belakangi oleh terbatasnya devisa untuk membeli beras import untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah juga melaksanakan program Bimas dengan memanfaatkan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan, seperti mahasiswa fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor.

Pada Masa Orde Baru. Pengalaman pada masa sebelumnya membuat pemerintah ingin menyempurnakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia yang waktu itu masih bernama Bank Koperasi Tani dan Nelayan untuk mendapatkan dana bagi petani kecil. Pada tahun 1967 dibentuk *Kolognas* sebagai badan yang menangani distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang kemudian diubah menjadi **BULOG**.

Pada tahun 1968 Pemerintah membuat kebijakan baru dalam bidang pangan yaitu dengan mengimport beras serta menjaga antara penawaran dan permintaan agar harga stabil. Bahkan pada tahun 1984 setelah melalui proses yang panjang Indonesia mampu berswasembada beras. Demikian juga pada tahun 2007 ditengah krisis pangan dunia, Indonesia ternyata mampu berswa-sembada beras, sehingga mendapat

penghargaan dari FAO. Namun akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, maka pada tahun 1990-1995 Indonesia telah menjadi pengimport beras yang mencapai 54% dari kebutuhan pasar. Hal tersebut juga dipicu oleh angka pendapatan yang meningkat khususnya golongan menengah atas, sementara itu nilai import pangan ternyata relatif lebih murah daripada produk dalam negeri yang sama.

Pada masa Paska Orde Baru. Pada tahun 1997 bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter yang berlanjut pada krisis pangan, akibat fenomena alam **el Nino**. Hal tersebut mengakibatkan produksi beras dalam negeri merosot tajam. Upaya Pemerintah adalah mengimport beras dari luar, namun mengalami kesulitan karena terbatasnya devisa. Sehingga suatu hal yang dramatis bahwa Indonesia sebagai negara yang penduduknya makan beras harus hutang lunak (*soft loan*) luar negeri. Pada bulan September 1998 pemerintah mencabut monopoli beras yang diberikan kepada BULOG, dan mulai memberikan kesempatan pihak Swasta untuk import beras. Karena pada tahun tersebut beras import lebih murah dari harga dalam negeri, maka swasta mengimport beras dalam jumlah besar. Hal tersebut yang mengakibatkan petani menderita karena panen Raya harus bersaing dengan beras import, sementara gudang beras Bulog masih melimpah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka Bulog membeli gabah langsung petani untuk menjaga harga pasaran tidak jatuh.

IV. PENGARUH DAN UPAYA KETAHANAN PANGAN TERHADAP PERTAHANAN NEGARA.

Dengan demikian, maka Secara alamiah, dari aspek sosial bila suatu kelompok masyarakat mengalami kekurangan pangan, maka pada tingkat awal menimbulkan kelaparan, kerusuhan (*chaos*), yang dapat memicu terjadi konflik sosial dan revolusi sosial. Dari aspek kesehatan akan menurunkan kualitas kesehatan/hidup individu, bahkan secara ekstrim dapat menimbulkan terjadinya *lost generation*. Apabila hal tersebut terjadi tentunya akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kemampuan fisik manusia Indonesia. Mengingat bahwa sistim perang kita adalah **Sishanta** yang melibatkan rakyat, maka kesiapan rakyat sebagai sumber daya nasional sangat dominan. Kebutuhan pangan dalam arti yang luas bukan hanya dalam arti karbohidrat saja, namun juga protein (hewani dan nabati), lemak, vitamin, dan lain-lain, karena pemenuhan pangan bukan hanya dari kuantitas saja, namun juga harus dari sisi kualitas.

Dengan melaksanakan Sishanta, maka perang yang kita laksanakan tidak dapat dibatasi oleh waktu, karena indikator keberhasilan adalah apabila negara yang melakukan invasi telah meninggalkan Indonesia dengan kekalahan. Sehingga bukan hal yang mustahil bila kita akan melaksanakan perang secara berlarut, seperti yang dilaksanakan oleh Vietnam saat sekarang. Oleh karena itu agar kita mempunyai sumber daya manusia yang tetap handal, dan mampu berjuang secara terus menerus harus didukung oleh logistik yang handal pula. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus disusun dan disiapkan secara dini dalam *logistik wilayah* dan *cadangan materiil strategis*.

*** Upaya Dalam Mengatasi ketahanan pangan**

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa : ayat (1) ; **Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen Pendukung.** Ayat (2) ; **Sistem Peretahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang Pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dan kekuatan bangsa.** Pemahaman dari pasal tersebut, maka sesungguhnya masalah pangan bukan domain Kementerian Pertahanan, dan tetap menjadi tanggung jawab Kementerian terkait.

Namun Kemhan berkepentingan masalah pangan karena untuk mendukung sistim pertahanan negara yang menyangkut hidup matinya suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan **Kebijakan Umum Presiden tahun 2008**, maka masalah pangan sesungguhnya sudah ditangani oleh Kementerian teknis yang terkait. Dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara, maka **Kementerian Pertahanan berperan sebagai penjuror melibatkan departemen/instansi lain terkait sesuai bidang tugas masing-masing.** Sehingga setiap kementerian/instansi **wajib mempunyai program untuk menjaga dan menciptakan kondisi ketahanan nasional dalam rangka pertahanan negara.** Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga-lembaga lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertahanan, mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan, serta memberi ruang bagi sektor lain untuk berperan serta dalam pengelolaan pertahanan negara. Penanggulangan masalah pangan merupakan upaya mencapai ketahanan pangan yang menjadi sub dari ketahanan ekonomi yang ujungnya adalah ketahanan nasional bangsa. Sebagai bagian dari Ketahanan Nasional, maka ketahanan pangan juga merupakan upaya dalam konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui penyelenggaraan **kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara.**

Mengacu kepada definisi tersebut, maka secara garis besar sesungguhnya Kementerian Pertanian, Bulog dan instansi terkait lainnya sudah mempunyai strategi walaupun berbeda namun memiliki sasaran yang sama. Contohnya Bulog telah membagi menjadi tiga (3) pilar untuk mengatasi katahanan pangan yaitu *Availability* (ketersediaan), *Accesibility* (keterjangkauan phisik dan ekonomi), dan *Stability* (stabilitas pasokan dan harga). Sedangkan kementerian Pertanian strateginya dalam sistem ketahanan Pangan membagi dalam tiga (3) subsistem yaitu : subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan sub sistem Konsumsi.

Oleh karena itu Kemhan tidak akan intervensi terhadap kebijakan kementerian terkait, namun bisa ikut serta untuk sinergiskan agar semua kebijakan ketahanan pangan sebagai salah satu subsistem ketahanan nasional yang terkait dengan

kepentingan Pertahanan Neagara dapat konvergen, yaitu pembangunan untuk mencapai kesejahteraan namun juga dapat untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Sebagai contoh dalam krisis pangan dunia tahun 2007, maka jajaran TNI (khususnya TNI-AD) telah membantu dengan menginstruksikan kepada jajaran Komando Kewilayahan (dari Kodam s/d Koramil) untuk turut mendukung swa sembada pangan, sehingga di beberapa daerah (Kodam VII/ WRB) dapat tercapai surplus pangan.

V. PENUTUP

Demikian secara singkat hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah ketahanan pangan dan hubungannya dengan pertahanan negara, guna mewujudkan rakyat Indonesia yang sehat, kuat cerdas dan memiliki wawasan kebangsaan dan semangat bela negara yang merupakan modal utama dalam sistem pertahanan negara khususnya dalam menciptakan ketahanan nasional yang tangguh.

Jakarta, Juli 2010.
Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,

Budi Susilo Soepandji

Paraf :

1. Ksb. TU : Vide draft
2. Dirpot SDAB : Vide draft
3. Sesditjen : Vide draft

Sumber:

1. Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008.
2. Kebijakan Umum Presiden 2008.
3. Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005. Jonathan Lassa.
4. Paradigma Ketahanan Pangan Indonesia. Nuhfil HananiAR.
5. The New Megatrends that will Change the world. Jack A. Goldstone
6. Kebijakan Pembangunan Tanaman pangan untuk kepentingan kesejahteraan dan Pertahanan negara.
7. National Geographic Indonesia. Juni, 2009.
8. Pembangunan Ekonomi didunia Ketiga. Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. Edisi kedelapan.